

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema, dan Romli Atmasasmitha, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Percetakan Ekonomi, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang.
- Hamzah, A. dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harsono, C. I., 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan Keenam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Herliyanto, Mareto Iko, 2013, Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang Melebihi Kapasitas (Study Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Payuse, I Nyoman Aji Duranegare, 2013, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivisme*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ramadhanda, Vianda Tia, 2017, *Pembinaan Terpidana Mati Berstatus Warga Negara Asing Sebelum Eksekusi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta (Studi Kasus Terpidana Mati Mary Jane Feloso)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Internet

- Agustina, Dewi, “50 Napi Lapas Kerobokan Dipindahkan ke Lapastik Bangli”, <http://m.tribunnews.com/amp/regional/2017/09/22/50-napi-lapas-kerobokan-dipindahkan-ke-lapastik-bangli>, diakses 7 Mei 2018.

- David Saut, Prins, “10 Napi LP Kerobokan Dipindahkan ke Nusakambangan”, <https://news.detik.com/berita/3615309/10-napi-lp-kerobokan-dipindahkan-ke-nusakambangan>, diakses 8 Mei 2018.
- Gamar, Robinson, “Over Kapasitas, Sebagian Penghuni Lapas Kerobokan Dipindah”, <http://regional.kompas.com/read/2017/05/05/22275361/over.kapasitas.sebagian.penghuni.lapas.kerobokan.dipindah>, diakses 1 Oktober 2017.
- Handoko, Ervan, “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013”, <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>, diakses 24 Maret 2018.
- Hermawan, Bayu, “Menkumham: Jumlah Napi di Indonesia Terus Meningkatkan”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/17/omysyb354-menkumham-jumlah-napi-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses 24 Oktober 2017.
- Ismayana, Made Ardiangga, “Jerinx dan Gede Robi Hentak Lapas Kerobokan. Lagu Mafia Hukum dan Sunset di Tanah Anarki Bergemuruh!”, <http://bali.tribunnews.com/2016/10/28/jerinx-dan-gede-robi-hentak-lapas-kerobokan-lagu-mafia-hukum-dan-sunset-di-tanah-anarki-bergemuruh>, diakses 26 Maret 2018.
- Muhajir, Anton, “Lapas Kerobokan Kurang Penjaga, Empat Narapidana Asing Kabur”, <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/napi-kerobokan-kabur-06192017134458.html>, diakses 2 Oktober 2017.
- Prasetia, Andhika, “Menkum HAM: Jumlah Napi di Lapas Capai 214 Ribu Hingga Maret 2017”, <https://news.detik.com/berita/d-3470072/menkum-ham-jumlah-napi-di-lapas-capai-214-ribu-hingga-maret-2017>, diakses 1 Oktober 2017.
- Rosidin, Imam, “Ini Alasan Napi Pekanbaru Kabur Menurut Polisi”, <http://bali.tribunnews.com/2017/05/06/ini-alasan-napi-di-lapas-pekanbaru-kabur-menurut-polisi?page=all>, diakses 1 Oktober 2017.

Sukiswanti, Puji, “Dipindah ke Jawa Timur, 66 Napi Lapas Kerobokan Mengumpat ke Petugas”, <https://news.okezone.com/read/2016/04/27/340/1373605/dipindah-ke-jawa-timur-66-napi-lapas-kerobokan-mengumpat-ke-petugas>, diakses 8 Mei 2018.

Wijaya, Tubagus Heru Dharma, “Pidana Kerja Sosial dalam pembaruan Sistem Pemidanaan”, <http://www.hukumpedia.com/tubaguseru18/perkembangan-sistem-pemidanaan-indonesia>, diakses 24 November 2017.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 1 Oktober 2017.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db59bd20-6bd1-1bd1-bad9-313134333039>, diakses 28 Februari 2018.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db59bd20-6bd1-1bd1-bad9-313134333039>, diakses 24 Maret 2018.

<https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>, diakses 22 Desember 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 751).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 810).

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

E. Lain-lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.